

**PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAN  
DANAALOKASI UMUM (DAU) TERHADAP INDEKS  
PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM) DENGAN BELANJA  
MODAL DAN PERTUMBUHAN EKONOMI SEBAGAI  
VARIABEL INTERVENING**

**(Studi Kasus pada Kota dan Kabupaten di Provinsi Jawa Tengah Tahun  
2010-2018)**

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan program Sarjana  
Ekonomi(S1) pada Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN Yogyakarta

**RINGKASAN SKRIPSI**



**Disusun Oleh :**

**ERISKA FIRDAYANTI**

**111527995**

**PROGAM STUDI AKUNTANSI  
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI  
YAYASAN KELUARGA PAHLAWAN NEGARA  
YOGYAKARTA**

**2020**

**SKRIPSI**

**PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAN  
DANA ALOKASI UMUM (DAU) TERHADAP INDEKS  
PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM) DENGAN BELANJA  
MODAL DAN PERTUMBUHAN EKONOMI SEBAGAI  
VARIABEL INTERVENING  
(Studi Kasus pada Kota dan Kabupaten di Provinsi Jawa Tengah Tahun  
2010-2018)**

Dipersiapkan dan disusun oleh:

**ERISKA FIRDAYANTI**

No Induk Mahasiswa: 1115 27995

telah dipresentasikan di depan Tim Penguji pada tanggal 14 Februari 2020 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E.) di Bidang Akuntansi.

**Susunan Tim Penguji:**

Pembimbing



Rudy Badrudin, Dr, M.Si

Penguji



Atika Jauharia Hatta, Dr, M.Si, Ak.

Yogyakarta, 14 Februari 2020  
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN Yogyakarta  
Ketua



Haryono Subiyakto, Dr., M.Si.

# PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dengan menggunakan Belanja Modal (BM) dan Pertumbuhan Ekonomi sebagai Variabel Intervening pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2010-2018.

Penelitian ini dilakukan di 29 Kabupaten dan 6 Kota dengan menggunakan metode purposive sampling diperoleh 315 sampel data. Pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan Structural Equation Model dari WarpPLS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal, dana alokasi umum berpengaruh positif terhadap belanja modal, belanja modal berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi, dan pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif terhadap indeks pembangunan manusia.

**Kata Kunci:** Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Belanja Modal, Pertumbuhan Ekonomi, Indeks Pembangunan Manusia.

## 1.1 Latar Belakang

Desentralisasi termasuk prinsip yang dijalankan guna menciptakan pembangunan daerah dengan diterapkannya Otonomi Daerah yakni pemberian kebebasan untuk pemerintah daerah dalam melaksanakan pengelolaan keuangan. Kewenangan diberikan untuk daerah lebih besar guna menjalankan dan mengelola rumah tangganya tanpa keikutsertaan dari pemerintah pusat, hal ini bertujuan antara lain sebagai peningkatan pelayanan masyarakat serta membantu dalam pemantauan dan pengontrolan dalam menggunakan dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

APBD terdiri dari Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan. Sumber-sumber pendapatan daerah yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan lain-lain pendapatan yang sah. Sumber pendapatan asli daerah merupakan sumber keuangan daerah yang digali dalam daerah yang bersangkutan yang terdiri dari pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah atau sumberdaya alam dan lain-lain pendapatan yang sah.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan penghasilan yang berasal dari daerah sebagai modal utama untuk membiayai pemerintahan dan pembangunan daerah dan merupakan cermin kemandirian bagi suatu daerah. Besarnya presentase PAD terhadap pendapatan daerah menunjukkan sumbangan PAD terhadap total pendapatan daerah.

Dana perimbangan menurut Kuncoro (2014:58) adalah dana yang bersumber dari penerimaan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk membiayai kebutuhannya dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana perimbangan terdiri

dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH). Dana Alokasi Umum menurut Halim (2008:160) merupakan dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan daerah untuk membiayai kebutuhan dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

Permendagri No.13 tahun 2006 mengenai Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah pasal 50 menjelaskan bahwa kelompok Belanja terdiri dari Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung. Belanja Langsung pemerintah terdiri dari tiga komponen, yaitu Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Modal. Belanja Modal merupakan komponen Belanja Langsung dalam anggaran pemerintah yang menghasilkan output berupa asset tetap tersebut ada yang bersinggungan langsung dengan pelayanan publik dan ada yang tidak dimanfaatkan langsung oleh publik.

Pengalokasian Belanja Modal untuk kelancaran tugas pemerintah daerah ataupun untuk kesejahteraan masyarakat dipengaruhi oleh sumber-sumber pendapatan daerah. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa Belanja Modal dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan lain-lain pendapatan yang sah. Berikut merupakan Data Realisasi APBD pada tahun 2018 di semua provinsi di Indonesia, sebagai berikut :

Tabel 1.1 Realisasi APBD Pemerintah daerah di Indonesia tahun anggaran 2018.

AKUN	ANGGARAN	REALISASI	%
<b>Pendapatan</b>	<b>1.094.971.030.574</b>	<b>1.125.847.394.538</b>	<b>102,82 %</b>
<b>PAD</b>	<b>269.893.564.902</b>	<b>261.636.628.711</b>	<b>96,94 %</b>
1. Pajak daerah	184.807.468.095	185.528.930.233	100,39 %
2. Retribusi daerah	12.166.201.868	9.131.292.507	75,05 %
3. hasil pengelolaan Kekayaan daerah	8.536.147.731	7.903.082.700	92,58 %
4. lain-lain PAD yang sah	64.383.747.207	59.073.323.269	91,75 %
<b>Dana Perimbangan</b>	<b>666.655.392.614</b>	<b>675.055.418.150</b>	<b>101,26 %</b>
DAU	401.432.944.161	374.371.223.974	93,26 %
DAK	175.100.516.106	163.490.815.256	93,37 %
DBH	90.121.932.345	137.193.378.918	152,23%
<b>Lain-lain pendapatan yang sah</b>	<b>158.422.073.057</b>	<b>189.155.347.677</b>	<b>119,4%</b>
<b>Belanja</b>	<b>1.153.852.930.000</b>	<b>1.023.386.991.624</b>	<b>88,69 %</b>
Belanja tidak langsung	614.901.404.438	564.072.362.215	91,73 %
Belanja langsung	538.951.525.561	459.314.629.409	85,22 %
Belanja Modal	223.554.406.781	187.847.327.787	84,03 %
Belanja pegawai	44.797.579.880	38.281.929.850	85,46 %
Belanja barang	270.599.538.899	233.185.371.770	86,17 %
Dan jasa			
<b>Pembiayaan</b>	<b>60.349.707.770</b>	<b>71.187.672.067</b>	<b>117,96 %</b>
<b>Penerimaan</b>	<b>74.017.108.620</b>	<b>87.945.888.625</b>	<b>118,82 %</b>
<b>Pengeluaran</b>	<b>13.667.400.850</b>	<b>16.758.216.557</b>	<b>122,61%</b>

Berdasar Tabel 1.1 dapat dilihat bahwa besarnya sumbangan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Pendapatan daerah relatif besar yaitu 96,94 %. Namun hal ini tetap mengharuskan pemerintah daerah untuk tetap berupaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah secara terus menerus dan berkelanjutan agar Pendapatan Asli Daerah terus meningkat dan memperkecil ketergantungan terhadap pemerintah pusat.

Persentase Dana Alokasi Umum yang diterima oleh pemerintah daerah sebesar 93,26%. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat ketergantungan pemerintah daerah masih tergolong tinggi. Semakin besar penerimaan Dana Alokasi Umum



yang merupakan sumber pendapatan daerah diharapkan dapat meningkatkan alokasi belanja modal.

Meskipun pemerintah pusat telah mendorong untuk meningkatkan pengalokasian belanja modal, namun realitasnya persentase Belanja Modal dalam pelaksanaannya memiliki kecenderungan yang menurun jika dibandingkan dengan total belanja daerah. Oleh karena itu pemerintah harus menggunakan sumber-sumber pendapatan daerah untuk digunakan dalam hal pelayanan publik.

Belanja Modal (BM) merupakan komponen penting yang diperhatikan publik, karena digunakan sebagai dasar evaluasi dan koreksi bagi pemerintah daerah dalam mengalokasikan pengeluaran dalam rangka pembangunan di daerahnya. Dengan peningkatan pengeluaran pemerintah, khususnya belanja modal diharapkan dapat mendorong peningkatan ekonomi masyarakat yang dapat memacu pertumbuhan perkapita. Selain itu, juga diharapkan menjadi faktor pendorong timbulnya berbagai investasi baru di daerah dalam mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya yang ada sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi di daerah.

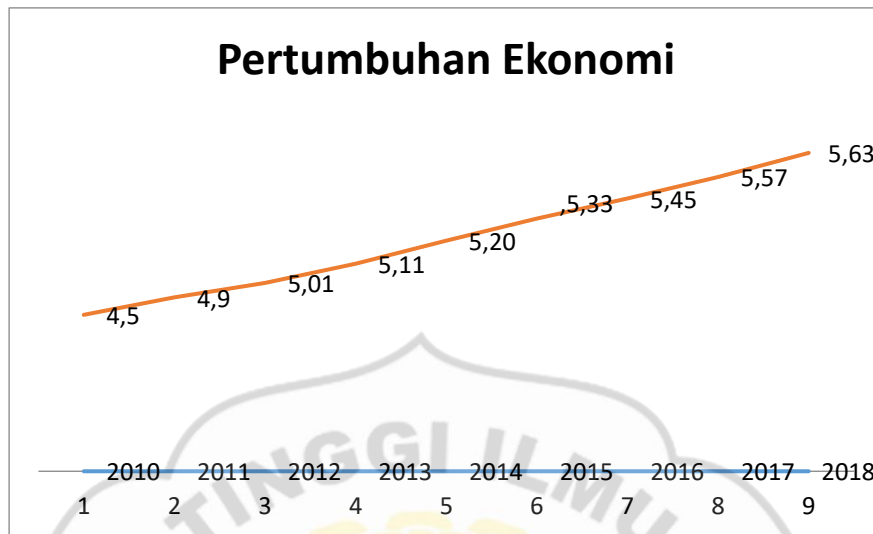
Pertumbuhan ekonomi memungkinkan penduduk di suatu daerah untuk mengalokasikan pengeluaran guna pendidikan dan kesehatan lebih banyak. Faktanya, pengeluaran pemerintah untuk pelayanan kesehatan dan pendidikan relatif sedikit. Jika pertumbuhan ekonomi di suatu daerah meningkat maka indeks pembangunan manusia juga akan meningkat sejalan dengan belanja modal dan pengeluaran pemerintah yang relatif sedikit.

Menurut BPS (2016), Indeks Pembangunan Manusia mengukur pencapaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. IPM

mengukur aspek-aspek yang relevan dengan pembangunan manusia melalui indeks komposit yang terdiri dari tiga komponen utama yaitu kesehatan, pendidikan dan pendapatan (daya beli). Standar pembangunan manusia yang menjadi kesepakatan antara rata-rata lamanya bersekolah yang digunakan untuk mengukur keberhasilan dalam pendidikan, angka harapan hidup yang digunakan untuk mengukur keberhasilan dalam bidang kesehatan, dan pendekatan pendapatan digunakan untuk mengukur keberhasilan dalam bidang pembangunan untuk hidup yang layak.

Kondisi keuangan obyek studi, yaitu total pendapatan daerah dan total pengeluaran daerah pada APBD seluruh Kabupaten dan Kota di Jawa Tengah memberikan informasi yang mencakup karakteristik dan dinamika kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah khususnya data keuangan dan perekonomian serta hubungan antara kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah dengan pemerintah Provinsi Jawa Tengah, pemerintah kabupaten/kota lain di Provinsi lain, dan pemerintah pusat. Total Pendapatan Daerah pada APBD kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah menunjukkan kemampuan dalam memperoleh sumber pendanaan APBD, baik yang berasal dari dalam kabupaten/kota maupun yang berasal dari luar kabupaten/kota (Badrudin, 2012).

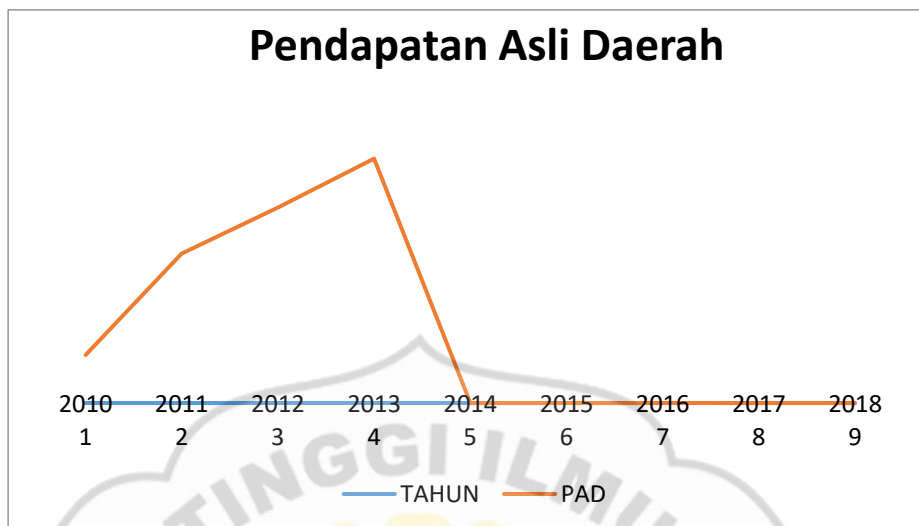




**Grafik 1.1**

## **Pertumbuhan Ekonomi di Jawa Tengah**

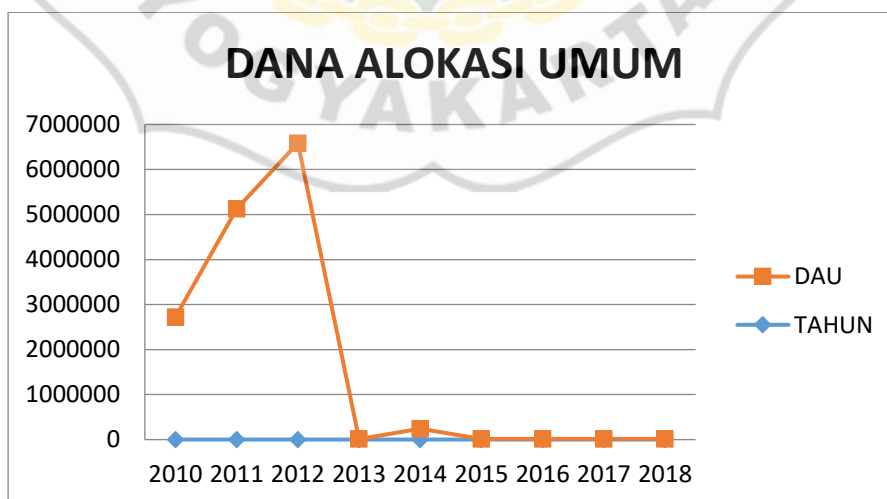
Perekonomian di Jawa Tengah pada tahun 2018 tumbuh sebesar 5,63% di atas pertumbuhan ekonomi nasional yaitu 5,07% (BPS, 2017). Daerah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah rata-rata tumbuh sekitar 5,02%. Tingginya rata-rata laju pertumbuhan Total Pengeluaran Daerah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah menunjukkan indikasi bagaimana pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah sangat antusias dalam melaksanakan kegiatan pembangunan, baik melalui alokasi anggaran untuk belanja tidak langsung maupun belanja langsung di masing-masing kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah.



Grafik 1.2

### Pendapatan Asli Daerah di Jawa Tengah

Berdasarkan rata-rata kontribusi PAD terhadap Total Pendapatan Daerah masing-masing kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah maka nilainya hanya sebesar 20,08%. PAD mengalami penurunan di tahun 2014. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan keuangan kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah rendah (Halim, 2004:37).



Grafik 1.3

### Dana Alokasi Umum Jawa Tengah

Grafik 1.3 menunjukkan dana alokasi umum di Jawa Tengah yang mengalami penurunan di tahun 2013 sebesar 737.391. Selain itu di tahun 2014 mengalami sedikit kenaikan, namun pada tahun 2015 sampai 2018 tidak mengalami kenaikan. Hal ini menunjukkan tingkat ketergantungan provinsi Jawa Tengah tergolong rendah.

Tingginya rata-rata laju pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah belum dapat mengindikasikan semakin sejahteranya masyarakat kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah. Dalam studi ini, pertumbuhan ekonomi yang ingin dicapai oleh masing-masing kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah adalah pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, yaitu pertumbuhan ekonomi yang mendukung pencapaian pembangunan manusia yang tinggi. Korelasi positif pertumbuhan ekonomi dan pembangunan manusia tercermin dalam wujud perbaikan kualitas kehidupan seluruh masyarakat.

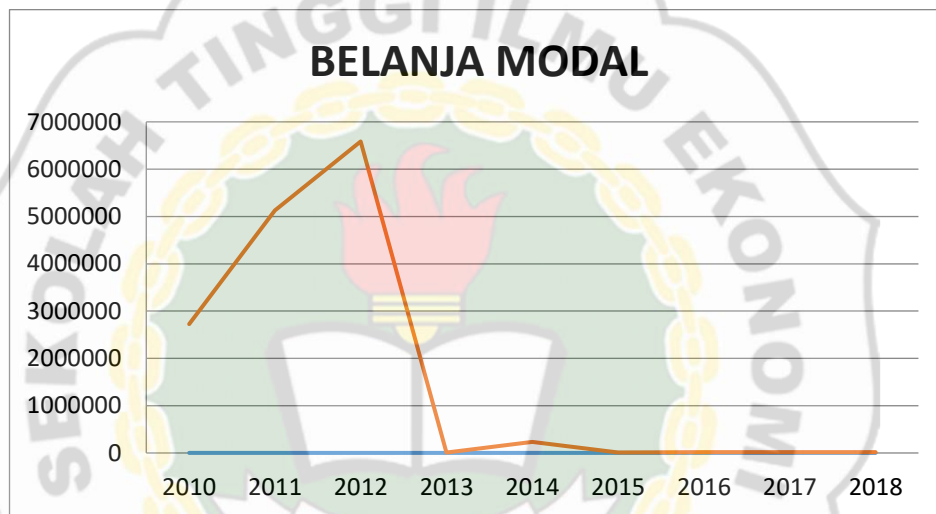


**Grafik 1.4**

### **Perkembangan IPM Jawa Tengah**

Angka IPM semua kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2010 s.d 2018 mengalami kenaikan. Hal lain yang dapat dilihat adalah angka IPM untuk kota

cenderung lebih tinggi daripada angka IPM untuk kabupaten. Hal ini dapat dilihat bahwa fasilitas yang lebih lengkap untuk kota seperti fasilitas fisik, fasilitas pendidikan, dan fasilitas kesehatan karena faktor belanja modal dan pertumbuhan ekonomi kota lebih besar nilainya daripada belanja modal dan pertumbuhan ekonomi di kabupaten.



Grafik 1.5

### Belanja modal di Jawa Tengah

Belanja modal juga merupakan suatu hal yang dapat membantu untuk meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat. Belanja modal provinsi Jawa Tengah mengalami kenaikan dari tahun 2010 sampai dengan 2012. Sedangkan pada tahun 2013 sampai dengan tahun 2018 mengalami penurunan. Oleh karena itu, pemerintah harus berupaya menggunakan sumber pendapatan daerah untuk hal pelayanan publik.

Menurut UU/33/2004 PAD dan DAU digunakan untuk belanja modal daerah. Hubungan antara PAD dengan Belanja Modal adalah semakin tinggi PAD suatu daerah, maka semakin tinggi daerah untuk merealisasikan Belanja Modal

# PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

yang digunakan pemerintah daerah dalam mengalokasikan pengeluaran dalam rangka pembangunan dan peningkatan sarana dan prasarana di daerah.

Jika Belanja Modal meningkat diharapkan dapat mendorong peningkatan ekonomi masyarakat yang dapat memacu pertumbuhan perkapita. Peningkatan pertumbuhan ekonomi akan mempengaruhi pola konsumsi masyarakat dan pola konsumsi masyarakat akan mempengaruhi daya beli masyarakat yang semakin tinggi. Dengan meningkatnya daya beli masyarakat dapat meningkatkan IPM dikarenakan komponen dari IPM salah satunya daya beli.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasar latar belakang di atas disusun rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap Belanja Modal di Kota dan Kabupaten di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2010-2018 ?
2. Apakah Dana Alokasi Umum berpengaruh terhadap Belanja Modal di kota dan kabupaten di provinsi Jawa Tengah pada tahun 2010-2018 ?
3. Apakah Belanja Modal berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi di kota dan kabupaten di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2010-2018 ?
4. Apakah Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia di kota dan kabupaten di provinsi Jawa Tengah pada tahun 2010-2018 ?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Berdasar latar belakang dan rumusan masalah, maka tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh:

1. Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal di kota dan kabupaten di provinsi Jawa Tengah pada tahun 2010-2018.
2. Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal di kota dan kabupaten di provinsi Jawa Tengah pada tahun 2010-2018.
3. Belanja Modal terhadap Pertumbuhan Ekonomi di kota dan kabupaten di provinsi Jawa Tengah pada tahun 2010-2018.
4. Pertumbuhan Ekonomi terhadap Indeks Pembangunan Manusia di kota dan kabupaten di provinsi Jawa Tengah pada tahun 2010-2018.

## Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat yang positif baik secara teoritis maupun praktis. Manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

### 1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan kajian untuk penelitian selanjutnya, yaitu referensi tentang faktor-faktor yang mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

### 2. Manfaat Praktis

#### a. Bagi masyarakat

Dapat memberikan informasi kepada masyarakat mengenai kebijakan pemerintah daerah dalam penggunaan APBD serta peningkatan kualitas pembangunan manusia.



b. Bagi pemerintah

Bahan referensi untuk mengambil kebijakan strategis dalam upaya peningkatan Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi dengan alokasi dana APBD yang ada, sehingga pembangunan di Jawa Tengah akan menghasilkan pembangunan yang inklusif.

#### 1.4 Kontribusi Penelitian

Penelitian pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Indeks Pembangunan Manusia dengan Belanja Modal dan Pertumbuhan Ekonomi sebagai variabel intervening telah cukup banyak dilakukan. Namun beberapa penelitian terdahulu menunjukkan hasil yang belum konklusif, yaitu belanja modal, dan pertumbuhan ekonomi yang secara teori mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui capaian indeks pembangunan manusia ternyata secara praktek belum mampu berdasarkan fakta yang terjadi, sehingga menarik untuk penelitian lebih lanjut.

Dalam penelitian sebelumnya (Raviyanti, 2017) sampel yang digunakan adalah kota dan kabupaten di provinsi Papua dengan periode penelitian 2009-2013, penelitian (Baeti, 2013) sampel yang digunakan adalah kabupaten dan kota di provinsi Jawa Tengah tahun 2007-2011. Sedangkan penelitian ini menggunakan sampel dari kota dan kabupaten di provinsi yang sama yaitu Jawa Tengah, namun dengan periode tahun penelitian yang baru yaitu tahun 2010-2018. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan alokasi belanja modal, sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang akan meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat.

# PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

## LANDASAN TEORI

### 1.4.1 Teori Keagenan (Agency Theory)

Teori agency pada awalnya dieksplorasi oleh Ross (1973), sedangkan eksplorasi teoritis secara mendetail dari teori keagenan pertama kali dinyatakan oleh Jensen dan Mecking (1976) menyebutkan bahwa manajer suatu perusahaan sebagai “agen” dan pemegang saham “principal”. Pemegang saham yang merupakan principal mendelegasikan pengambilan keputusan bisnis kepada manajer yang merupakan perwakilan atau agen dari pemegang saham. Permasalahan yang muncul sebagai akibat sistem kepemilikan perusahaan seperti ini, bahwa agen tidak selalu membuat keputusan-keputusan yang bertujuan untuk memenuhi kepentingan terbaik pemegang saham.

## METODE PENELITIAN

### *Partial Least Square (PLS)*

Data dalam penelitian ini menggunakan model SEM berbasis PLS. Tahapan analisis model struktur pada PLS, yaitu:

1. *Outer Model*, memastikan indikator yang digunakan layak untuk dijadikan pengukuran.
2. *Inner Model*, memastikan keakuratan model struktural yang dilihat dari koefisien determinasi ( $R^2$ ), *predictive relevance* ( $Q^2$ ), dan *Goodness of Fit Index* (GoF).
3. Pengujian Hipotesis, dapat dilihat dari nilai probabilitas  $< 0,05$  dan t-statistik.

Teknik analisis data yang digunakan untuk pengujian hipotesis:

1. Merancang model struktural: menggambarkan hubungan antara variabel laten satu dengan yang lainnya berdasarkan hipotesis.
2. *Outer model*: mendefinisikan hubungan setiap indikator dengan variabel latennya.
3. Membentuk diagram jalur
4. Melakukan estimasi
5. Mengevaluasi Model Struktural Konstruksi: variabel eksogen, endogen, dan pemoderasi dikatakan baik jika nilai *Average R-Square (ARS)* < 0,05. Untuk melihat hubungan antar variabel menggunakan *Average Path Coefficient (APC)* dengan nilai yang diharapkan  $APC < 0,05$ . *Average Variance Inflation Factor (AVIF)* digunakan untuk melihat besarnya korelasi antar variabel, dikatakan baik jika nilai  $AVIF < 5$ .
6. Pengujian

## PEMBAHASAN

### 1.4.2 Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal

PAD merupakan penerimaan yang diperoleh Pemerintah Daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri. Pemerintah Daerah dituntut untuk dapat meningkatkan penerimaan daerah dengan memanfaatkan potensi yang dimiliki agar dapat membiayai kegiatan pemerintahan, menyediakan fasilitas pelayanan publik dan membangun infrastruktur. Semakin banyak PAD yang diterima memungkinkan daerah tersebut memenuhi kebutuhan belanja daerahnya sendiri tanpa bergantung dari dana transfer yang diberikan pemerintah. PAD yang mengalami peningkatan diharapkan dapat meningkatkan investasi pada BM sehingga dapat memberikan pelayanan publik dengan baik.

Pengujian hipotesis menunjukkan hasil PAD berpengaruh positif dan signifikan terhadap BM. Hal ini menunjukkan bahwa semakin meningkat PAD, semakin meningkat pula BM, hal ini mengindikasikan alokasi BM ditentukan oleh besarnya PAD yang diterima, dengan pemanfaatan pos-pos penerimaan yang ada. PAD yang tinggi dialokasikan melalui BM untuk pembangunan dan perkembangan di daerah yang direalisasikan dalam bentuk pengadaan fasilitas dan infrastruktur untuk kepentingan publik.

Pengaruh positif dan signifikan dapat terjadi di Provinsi Jawa Tengah, salah satunya disebabkan faktor PAD Kabupaten Kudus yang relatif besar karena kontribusi dari industri rokok. Selain itu di Provinsi Jawa Tengah beberapa kabupaten mengandalkan sektor perdagangan, hotel, dan restoran serta sektor industri pengolahan sedang. Daerah perkotaan umumnya mengandalkan pada sektor perdagangan, hotel, dan restoran serta sektor jasa-jasa. Hal ini disebabkan

lahan pertanian di daerah perkotaan semakin berkurang dan kegiatan perekonomian lebih mengandalkan pada sektor non pertanian. Kota Semarang, Pekalongan, Tegal, dan Surakarta didominasi oleh sektor perdagangan, hotel, dan restoran sedang sektor jasa-jasa lebih dominan di Kota Magelang dan Kota Salatiga. Sedangkan Kabupaten Cilacap yang didominasi oleh sektor migas, hal ini mengakibatkan peningkatan PAD yang signifikan di Provinsi Jawa Tengah sehingga BM juga meningkat. Contohnya, pembangunan jalan tol Semarang-Surakarta dan Transjawa, peningkatan kualitas ruas jalan Cepu-Blora-Purwodadi-Semarang, dan peningkatan ruas jalan lintas tengah Pantura-Pansel. Hasil penelitian ini sejalan dengan Purwanto (2013), Dwirandra (2014) yang menemukan bahwa PAD berpengaruh positif terhadap Belanja Modal.

### **1.4.3 Pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal**

Adanya pengaruh positif DAU terhadap BM dapat memberikan penjelasan bahwa DAU memiliki keterkaitan dengan pembangunan infrastruktur daerah. Keterkaitan dengan pembangunan infrastruktur daerah karena bantuan berupa DAU yang dikirimkan dari pusat dan dipergunakan pemda ditujukan untuk mendanai kegiatan atau program pemerintah daerah melalui belanja daerah terutama Belanja Modal. DAU yang semakin besar diberikan oleh pusat, maka Belanja Modal semakin besar yang dianggarkan.

Hal ini tampak pada pembangunan antar kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah yaitu pada pengembangan prasarana pelabuhan penyeberangan lintas provinsi di Cilacap dan Kendal, pengembangan Pelabuhan Tanjung Mas, Batang, dan Rembang; pengembangan Bandara Ahmad Yani Semarang dan Bandara Adi

Sumarmo Surakarta peningkatan sarana dan prasarana penunjang eksploitasi, dan pengolahan minyak dan gas bumi di Kabupaten Blora (Badrudin,2012).

Dengan hasil temuan ini menunjukkan pemda berketergantungan dengan dana perimbangan yang dialokasikan pemerintah pusat untuk daerah dalam mendanai kegiatan daerahnya. Hasil pengujian ini sejalan dengan penelitian Permatasari dan Mildawati (2016) dan Wahyuningsih dan Widaryanti (2015), dan Ardhani (2011) yang menunjukkan DAU berpengaruh positif terhadap Belanja Modal.

#### **1.4.4 Pengaruh Belanja Modal terhadap Pertumbuhan Ekonomi**

Belanja Modal sebagai komponen Belanja Langsung pada Total Pengeluaran Daerah akan dialokasikan oleh pemerintah daerah untuk mendanai kegiatan pembangunan yang ditujukan untuk kepentingan masyarakat. Kegiatan pemerintah daerah ini akan menimbulkan permintaan barang dan jasa yang akan direspon oleh produsen untuk menghasilkan barang dan jasa sesuai dengan kebutuhan pemerintah daerah, sehingga akan terjadi aktivitas ekonomi yang akan membentuk nilai absolute Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan nilai relatif perubahan PDRB yang disebut dengan pertumbuhan ekonomi (Badrudin, 2012).

Pemda harus merencanakan dan mengelola kegiatan serta menyediakan sarana dan prasana dalam meningkatkan PE. BM termasuk salah satu belanja yang menjadi perhatian publik, karena masyarakat ingin mengetahui apakah pajak yang mereka bayarkan sudah dialokasikan secara tepat atau tidak. Semakin banyak anggaran yang diberikan dalam BM, maka pemda semakin giat dalam membangun fasilitas dan infrastruktur yang menunjang keberhasilan PE.



Hasil uji hipotesis menunjukkan BM memiliki hubungan negatif dan signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2010 s.d 2019. Hubungan negatif menunjukkan bahwa semakin meningkat belanja modal, maka semakin menurun pertumbuhan ekonomi, dan sebaliknya. Pengaruh negatif dan signifikan dapat terjadi. Hal tersebut disebabkan adanya pembangunan jalan tol di beberapa provinsi di Indonesia. Contohnya, dengan adanya jalan tol Semarang-Surakarta, perekonomian di jalur pantura menjadi lesu, karena masyarakat lebih memilih untuk lewat tol dibandingkan jalan pantura, karena jarak tempuh yang lebih cepat, akibatnya pedagang yang biasanya menjual oleh-oleh atau membuka warung makan mengalami penurunan pendapatan atau omset.

Penelitian ini sejalan dengan Gunantara dan Dwirandra (2014), dan Sita (2017) yang menunjukkan BM memiliki pengaruh negatif pada PE.

#### **1.4.5 Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Indeks Pembangunan Manusia**

Pertumbuhan ekonomi sebagai nilai relatif dari perubahan PDRB dari waktu ke waktu menunjukkan terjadinya peningkatan pendapatan masyarakat dari waktu ke waktu pula. Peningkatan pendapatan masyarakat ditunjukkan dengan peningkatan alokasi pendapatan untuk konsumsi kebutuhan primer, sekunder, dan tersier sehingga masyarakat daerah tersebut menjadi lebih kaya, lebih sehat, lebih berpendidikan sebagai indikator angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebagai Indikator Sosial (Arsyad, 2004:38).

IPM adalah indikator untuk mengukur kualitas hidup penduduk yang dilihat melalui angka kelahiran, pendidikan, dan pendapatan. PE yang mengalami peningkatan akan berpengaruh terhadap pendapatan yang diterima oleh masyarakat

# PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

agar dapat dialokasikan sebagian ke sektor kesehatan dan pendidikan untuk memperbaiki kualitas hidup masyarakat.

Pengujian hipotesis menunjukkan PE berpengaruh positif terhadap IPM. Hal ini menunjukkan PE mampu meningkatkan pendapatan masyarakat sesuai dengan harapan. Meskipun pendapatan yang diterima belum optimal, IPM menunjukkan progres yang cukup baik di kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Tengah. Pengaruh signifikan menunjukkan ketika pendapatan masyarakat mengalami peningkatan maka ada alokasi untuk kebutuhan primer, sekunder, dan tersier sehingga dapat memperbaiki kualitas hidup manusia. Dalam merencanakan pembangunan Pemerintah Daerah menyusun target dan rencana dalam mencapai tujuan tersebut. Apabila Pemerintah Daerah dapat memenuhi atau melebihi target yang ditetapkan dapat dikatakan Pemerintah Daerah telah berhasil mengelola pemerintahan begitu juga sebaliknya.

Pengaruh positif dan signifikan dapat terjadi di Provinsi Jawa Tengah, salah satunya di Kota Pekalongan yang didominasi oleh sektor Industri Kecil dan Menengah (IKM) Nasional. Industri yang dimaksud adalah industri Batik dan Galangan Kapal yang dapat meningkatkan investasi. IKM juga mampu memberikan kontribusi yang signifikan terhadap devisa negara. Hal tersebut berdampak positif bagi masyarakat yaitu meningkatnya penyerapan tenaga kerja sehingga dapat meningkatkan pendapatan masyarakat. Sehingga dapat disimpulkan bahwa secara tidak langsung, jika pendapatan masyarakat di kota Pekalongan meningkat, maka masyarakat akan sadar terhadap tingkat pendidikan dan kesehatan yang dapat meningkatkan angka IPM.

Penelitian ini sejalan dengan Syalkahfi (2016), Baeti (2013), dan Mirza (2012) yang menunjukkan PE memiliki pengaruh positif terhadap IPM. Sedangkan penelitian Badrudin (2012), Setyowati dan Yohana (2012) yang menunjukkan hasil PE berpengaruh negatif terhadap IPM.

## KESIMPULAN DAN SARAN

### 1.1 Kesimpulan

Berdasar pembahasan mengenai hubungan PAD, dan DAU terhadap IPM, dengan BM dan PE sebagai intervening dapat disimpulkan:

1. PAD berpengaruh positif dan signifikan terhadap BM. Semakin besar PAD yang diperoleh, semakin besar alokasi BM yang digunakan untuk membangun fasilitas dan infrastruktur dalam meningkatkan pelayanan kepada publik.
2. DAU berpengaruh positif dan signifikan terhadap BM. DAU yang dikirimkan dari pusat dan dipergunakan Pemerintah Daerah ditujukan untuk mendanai kegiatan atau program pemerintah daerah melalui belanja daerah terutama Belanja Modal. DAU yang semakin besar diberikan oleh pusat, maka Belanja Modal semakin besar yang dianggarkan.
3. BM berpengaruh negatif dan signifikan terhadap PE. Hal tersebut disebabkan adanya pembangunan jalan tol di provinsi Jawa Tengah. Dengan adanya pembangunan infrastruktur tersebut menyebabkan penurunan pendapatan masyarakat.
4. PE berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM. Meskipun pendapatan yang diterima belum optimal, IPM menunjukkan progres yang baik di kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Tengah, khususnya dalam bidang pendidikan dan kesehatan.

## 1.2 Saran

Berdasar kesimpulan yang dihasilkan dalam penelitian ini maka saran yang diberikan oleh peneliti, yaitu:

### 1 . Bagi Pemerintah Daerah

Pengalokasian Belanja Modal pada pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah pengalokasiannya sangat sedikit. Sebaiknya pemerintah daerah dapat meningkatkan pengalokasian belanja modal guna mempercepat pertumbuhan ekonomi sehingga dapat mengurangi ketimpangan pendapatan antardaerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

### 2. Bagi Peneliti Selanjutnya

Disarankan untuk dapat menambah variabel investasi lainnya selain belanja modal seperti belanja barang dan jasa, pendapatan lain-lain yang sah dan investasi swasta sehingga akan memperdalam kajian analisis.

## 1.3 Keterbatasan Penelitian

Berdasar temuan teoritis dan empiris yang dihasilkan dalam penelitian ini, terdapat keterbatasan yang melingkupi penelitian ini, yaitu:

1. Penggunaan variabel investasi dalam studi ini hanya terbatas pada belanja modal pada APBD kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah.
2. Penelitian tidak menggunakan data terkini yaitu tahun 2019 karena Laporan Realisasi Anggaran belum dipublikasikan di DJPK.

# PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim. 2004. Akuntansi Keuangan Daerah, Penerbit Salemba Empat, Jakarta.
- Arsyad, L. 2004. Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan Pembangunan. *Edisi Keempat*. STIE YKPN. Yogyakarta.
- Badrudin, Rudy. 2017. *Ekonomika ekonomi daerah. Edisi Kedua*, Yogyakarta : UPP STIM YKPN.
- Baldaric Siregar. 2015. Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta : STIM YKPN.
- Mardiasmo. 2009. Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: Andi Yogyakarta.
- Simanjuntak, Payaman. (2001). *Pengantar Ekonomi Sumberdaya Manusia*. Jakarta: LPFEUI.
- Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Pendidikan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Mardiasmo, B. D. 2002. Otonomi dan manajemen keuangan daerah: Andi Offset, Yogyakarta.
- Ardhani, Pungky. 2011. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal (Studi Pada Pemerintah Kabupaten/Kota Di Jawa Tengah). Skripsi (dipublikasikan). Semarang: Universitas Diponegoro.
- Badan Pusat Statistik, 2010, *Statistik Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2010-2018*, Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- BPS Jawa Tengah. (2010). *Jawa Tengah Dalam Angka 2010*. Jawa Tengah : BPSJawa Tengah.
- Badrudin, R. 2012. Pengaruh Desentralisasi Fiskal Terhadap Belanja Modal, Pertumbuhan Ekonomi, Dan Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah, UNIVERSITAS AIRLANGGA.
- Badrudin, Rudy and Siregar, Baldric (2015) *The Evaluation of The Implementation of Regional Autonomy in Indonesia*. Economic Journal of Emergin Markets, 7 (1). pp 1-11. ISSN p-ISSN:2086-3128 |e-ISSN : 2502-180X
- Baeti (2013). Pengaruh Pengangguran, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengeluaran



Pemerintah terhadap Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2007-2011. *Economics Development Analysis Journal Volume 2 Nomor 3*

Dwirandra, A.A.N.B. 2014. *Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Pada Belanja Modal Dengan PAD Dan DAU Sebagai Variabel Pemoderasi . e-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana 4.3(2013):563-584.*

Jensen, M. C., and W. H. Meckling. 1976. Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs and ownership structure. *Journal of financial economics* 3 (4):305-360.

Kurnia, Indra. 2013. Pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dan Kualitas Aparatur Pemerintah terhadap Akuntabilitas Keuangan. *Jurnal akuntansi.*

Litvack, Jennie , Seddon, Jessica, 1999, *Decentralization Breffing Notes*, The World Bank, Whashington, D.C.

Mirza. (2012). Pengaruh Kemiskinan, Pertumbuhan Ekonomi, Dan Belanja Modal Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Jawa Tengah Tahun 2006- 2009. *Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Negeri Semarang.*

Moe, T. M. 1984. The New Economics of Organization. *American Journal of Political Science* 28(5): 739-777.

Permatasari, Isti & Titik Mildawati. (2016). Pengaruh Pendapatan Daerah terhadap Belanja Modal pada Kabupaten/ Kota Jawa Timur. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, 5(1), 1-17.

Priambodo, Agung. 2014. Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Belanja Modal, dan Tenaga Kerja Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah.

Purwanto, fiona puspita devi .2013. “Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Daerah (PAD), dan Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Belanja Modal”. (Studi Kasus pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008-2011)”. *SKRIPSI Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta.*

Raviyanti, Sri dan Mahardika (2017). Pengaruh PAD, DAU, DAK Terhadap IPM dengan Belanja Modal sebagai Variabel Intervening (studi pada Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Tahun 2009-2013. *Jurnal Manajemen Volume XXII Nomor 02.*

Ross, S.A. 1997. The Economic Theory Of Agency. The Principal\’S Problem. *The American Economic Review*, 63(2): 134-139.

Sarkoro dan Zulfikar (2016). Dana Alokasi Khusus dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Indeks Pembangunan Manusia (studi empiris pada Pemerintah